

**IMPLEMENTASI HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN ORANG TERLANTAR
(Studi di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten
Banyumas)**

Oleh : Walin

Latifa

E1A021069

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi hukum peran serta masyarakat terhadap penanggulangan orang terlantar dan pengaruh faktor motivasi, kedisiplinan, dan komunikasi terhadap implementasi hukum peran serta masyarakat terhadap penanggulangan orang terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengambilan sampel penelitian menggunakan *simple random sampling*. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode angket, dokumenter, dan kepustakaan. Metode pengolahan data menggunakan teknik *coding*, *editing*, dan tabulasi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel data. Analisis data dengan distribusi frekuensi, tabel silang, analisis isi, dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum peran serta masyarakat terhadap penanggulangan orang terlantar adalah kurang efektif. Hal ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: efektifnya pelaporan orang terlantar kepada pihak yang berwenang; kurang efektifnya penyerahan pelaku kepada pejabat yang berwenang; kurang efektifnya pelaporan atas kelalaian pejabat dalam penanganan pelaporan masyarakat; dan kurang efektifnya penyaluran bantuan kepada panti sosial resmi. Faktor motivasi berpengaruh secara positif, artinya semakin tinggi faktor motivasi maka semakin tinggi pula implelementasi hukum peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar. faktor kedisiplinan dan faktor komunikasi cenderung kurang berpengaruh terhadap implementasi hukum peran serta masyarakat dalam penanggulangan orang terlantar.

Kata kunci: *Implementasi Hukum; Peran Serta Masyarakat; Orang Terlantar*

IMPLEMENTATION OF THE LAW ON COMMUNITY PARTICIPATION IN HANDLING VAGRANTS

(A Study in Grendeng Village, North Purwokerto District, Banyumas)

By:

Walin Latifa

E1A021069

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the law regarding community participation in addressing vagrants and the influence of motivation, discipline, and communication factors on the implementation of the law on community participation in tackling vagrants. This study uses a quantitative research method with an empirical legal approach and a descriptive research specification. The sampling technique used is simple random sampling. The types and sources of data include primary and secondary data, collected through questionnaires, documentary methods, and literature review. The data processing method employs coding, editing, and tabulation techniques, then presents the findings in narrative text and data tables. Data analysis includes frequency distribution, cross-tabulation, content analysis, and comparative analysis. The research results indicate that the implementation of the law on community participation in handling vagrants is less effective. This can be measured by the following indicators: the effectiveness of reporting vagrants to the relevant authorities; the ineffectiveness of transferring offenders to the proper authorities; the ineffectiveness of reporting officials' negligence in handling public reports; and the ineffectiveness of channeling aid to official social institutions. The motivation factor positively influences the implementation, this means that the higher the motivation factor, the higher the implementation of the law on community participation in dealing with displaced people. Discipline and communication factors tend to have less influence on the implementation of the law on community participation in addressing vagrants.

Keywords: *Law Implementation; Community Participation; Displaced People*